

## PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA BERDASARKAN ISAK 35

Ahmad Muflih Sitanggang<sup>1</sup>, Ahmad Rifai<sup>2</sup>, Novia Hanifa Surbakti<sup>3</sup>, Putri Kemala Dewi  
Lubis<sup>4</sup>, Khairani Alawiyah Matondang<sup>5</sup>, Rifka Ajeng Nurbalqis<sup>6</sup>

[ahmadmuflihsitanggang@gmail.com](mailto:ahmadmuflihsitanggang@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmadrifaihrp.2006@gmail.com](mailto:ahmadrifaihrp.2006@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[noviahhanifa55@gmail.com](mailto:noviahhanifa55@gmail.com)<sup>3</sup>, [putrikemala@unimed.ac.id](mailto:putrikemala@unimed.ac.id)<sup>4</sup>, [alawiyah@unimed.ac.id](mailto:alawiyah@unimed.ac.id)<sup>5</sup>,  
[rifkaajengnur07@gmail.com](mailto:rifkaajengnur07@gmail.com)<sup>6</sup>

Universitas Negeri Medan

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyajian laporan keuangan oleh organisasi nirlaba sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, khususnya studi literatur, yang melibatkan pemeriksaan berbagai sumber seperti buku, jurnal akademik, dan standar akuntansi yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ISAK 35 memberikan panduan yang jelas tentang penyajian laporan keuangan untuk organisasi nirlaba, termasuk laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan laporan keadaan keuangan. Selain itu, ISAK 35 juga mengatur klasifikasi aset bersih menjadi aset bersih terbatas dan aset bersih tidak terbatas, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana. Implementasi ISAK 35 telah terbukti meningkatkan kualitas pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba dengan membuatnya lebih sistematis, relevan, dan dapat dibandingkan. Namun, masih ada tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman mengenai standar akuntansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan implementasi ISAK 35 yang efektif. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan akuntansi, khususnya di bidang akuntansi organisasi nirlaba, dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

**Kata Kunci:** Akuntansi Nirlaba, ISAK 35, Laporan Keuangan, Transparansi, Akuntabilitas.

### PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba adalah entitas yang menjalankan aktivitasnya bukan dengan tujuan menghasilkan keuntungan, melainkan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat dan mencapai tujuan sosial tertentu. Organisasi nirlaba biasanya menerima pendanaan dari kontribusi, donasi, hibah, atau dukungan sukarela yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk mengelola dan melaporkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas dalam organisasi nirlaba sangat penting karena secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Para donatur dan masyarakat yang memberikan pendanaan membutuhkan informasi yang jelas dan dapat dipercaya tentang bagaimana dana tersebut digunakan. Dalam konteks ini, laporan keuangan berfungsi sebagai alat utama untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2019), pelaporan keuangan adalah sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan yang bertujuan untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi dan dalam menilai kinerja suatu entitas.

Meskipun bukan untuk mencari keuntungan, organisasi nirlaba tetap diharuskan untuk menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas tinggi, dapat dibandingkan, dan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di Indonesia, standar yang mengatur penyajian laporan keuangan untuk

organisasi nirlaba adalah Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang Laporan Keuangan Entitas Nirlaba, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2019.

ISAK 35 memberikan panduan yang lebih komprehensif dibandingkan standar sebelumnya, PSAK 45, khususnya dalam hal pengklasifikasian aset bersih dan penyajian komponen laporan keuangan. Menurut ISAK 35, laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan informasi tambahan. Selain itu, ISAK 35 juga menguraikan penyajian aset bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan dari penyedia sumber daya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

Namun, dalam praktiknya, banyak organisasi nirlaba belum sepenuhnya menerapkan standar ini secara optimal. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penerapan ISAK 35 adalah terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia dengan keahlian akuntansi, kurangnya kesadaran tentang standar akuntansi terbaru, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa beberapa organisasi nirlaba masih menyusun laporan keuangan dengan cara yang sederhana dan belum mematuhi standar yang berlaku. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Putri (2021), yang mencatat bahwa penerapan standar akuntansi di organisasi nirlaba masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemahaman dan implementasi teknis.

Situasi ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara standar akuntansi dan praktik yang diterapkan di lapangan. Jika ini berlanjut, kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba dapat dipertanyakan, yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang baik tentang pelaporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 sangat penting bagi organisasi nirlaba untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mereka dan memperkuat akuntabilitas kepada publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba sesuai dengan ISAK 35, sekaligus menyoroti pentingnya penerapan standar ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan akuntansi organisasi nirlaba dan menjadi referensi bagi organisasi nirlaba dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, penelitian ini berfokus pada bagaimana laporan keuangan disajikan dalam organisasi nirlaba sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35), termasuk komponen laporan keuangan yang diatur oleh standar ini, serta pentingnya penerapan standar ini dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan organisasi nirlaba. Penting untuk mengkaji masalah ini karena masih ada organisasi nirlaba yang belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan mereka (Sari & Rahmawati, 2020).

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan jelas, relevan, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (Kieso dkk., 2019). Selain itu, dalam konteks organisasi nirlaba, penerapan standar akuntansi seperti ISA 35 memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas publik, karena dana yang dikelola bersumber dari masyarakat (Mardiasmo, 2018). ISAK 35 memberikan panduan tentang bagaimana organisasi nirlaba harus menyajikan laporan keuangan mereka,

termasuk pengelompokan aset bersih dan komponen laporan keuangan yang harus disajikan secara sistematis (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan penyajian laporan keuangan oleh organisasi nirlaba sesuai dengan ISAK 35, mengidentifikasi komponen laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, dan menganalisis pentingnya penerapan ISAK 35 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan pemahaman yang baik tentang standar ini, diharapkan organisasi nirlaba dapat menyiapkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan lebih terpercaya.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap perkembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan organisasi nirlaba, dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan ISAK 35. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada organisasi nirlaba tentang pentingnya menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Selain itu, secara akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa dalam memahami penyajian laporan keuangan oleh organisasi nirlaba berdasarkan standar akuntansi Indonesia.

## **Studi Literatur**

### **Organisasi Nirlaba**

Organisasi nirlaba adalah entitas yang didirikan terutama untuk melayani masyarakat dan tidak berfokus pada menghasilkan keuntungan. Dana tambahan yang diperoleh dari kegiatan organisasi tidak diberikan kepada pemiliknya, tetapi digunakan kembali untuk mendukung kegiatan operasional organisasi dan mencapai tujuannya. Perbedaan ini memisahkan organisasi nirlaba dari bisnis yang berorientasi laba, yang berfokus pada memaksimalkan keuntungan (Anthony & Young, 2019).

Menurut Akuntansi Keuangan, organisasi nirlaba adalah entitas yang menerima sumber daya dari para donatur yang tidak mengharapkan pengembalian ekonomi langsung, yang berarti organisasi tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana ini secara efektif dan melaporkannya secara transparan kepada publik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan aspek penting dalam pengelolaan organisasi nirlaba.

Selain itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) menyatakan bahwa organisasi nirlaba adalah entitas yang tidak memiliki kepemilikan pribadi dan tidak mendistribusikan keuntungan kepada individu, tetapi menggunakan semua sumber dayanya untuk mendukung misi sosial, pendidikan, keagamaan, atau kemanusiaan. Definisi ini menekankan bahwa tujuan utama organisasi nirlaba adalah untuk memberikan pelayanan publik, bukan untuk mencari keuntungan ekonomi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salamon dan Anheier pada tahun 1997, organisasi nirlaba digambarkan sebagai bagian dari sektor ketiga, yang dicirikan sebagai organisasi formal, swasta, tidak mencari keuntungan, memiliki manajemen independen, dan melibatkan partisipasi sukarela. Keberadaan organisasi nirlaba sangat penting dalam mendukung pembangunan sosial, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah entitas yang berfokus pada pelayanan masyarakat, tidak berorientasi pada keuntungan, dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan melaporkan sumber daya yang diterimanya secara transparan dan akuntabel.

Organisasi nirlaba memiliki ciri khas yang membedakannya dari organisasi bisnis pada umumnya. Karakteristik ini berkaitan dengan tujuan organisasi, sumber pendanaan, dan pengelolaan sumber daya yang tersedia. Menurut Akuntansi Keuangan, organisasi nirlaba beroperasi dengan tujuan utama menyediakan layanan kepada masyarakat tanpa berfokus pada perolehan keuntungan. Oleh karena itu, semua sumber daya yang diperoleh digunakan untuk mendukung misi organisasi.

Salah satu ciri utama organisasi nirlaba adalah tidak adanya kepemilikan pribadi. Tidak seperti perusahaan yang dimiliki oleh individu atau pemegang saham, organisasi nirlaba tidak memiliki pihak yang berhak untuk berbagi keuntungan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang menyatakan bahwa organisasi nirlaba tidak mendistribusikan keuntungan kepada individu tetapi menggunakan semua dana untuk kepentingan organisasi dan masyarakat.

Selain itu, organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari pihak eksternal seperti donatur, pemerintah, atau masyarakat, yang tidak mengharapkan pengembalian ekonomi langsung. Situasi ini menyebabkan organisasi nirlaba sangat bergantung pada kepercayaan publik, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi sangat penting (Anthony & Young, 2019).

Ciri khas lainnya adalah pembatasan penggunaan dana yang diberikan oleh donatur. Dalam banyak kasus, para donatur memberikan dana dengan tujuan tertentu, sehingga organisasi harus mengelola uang tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini mengharuskan organisasi nirlaba untuk memiliki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang jelas sehingga penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan (Salamon & Anheier, 1997).

Selain itu, organisasi nirlaba seringkali bergantung pada partisipasi sukarela dalam operasionalnya. Banyak kegiatan dalam organisasi nirlaba didukung oleh sukarelawan yang tidak menerima kompensasi finansial, tetapi termotivasi oleh rasa kepedulian dan tanggung jawab sosial. Kehadiran sukarelawan merupakan salah satu kekuatan utama dalam mendukung keberlanjutan kegiatan organisasi (Salamon & Anheier, 1997).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik organisasi nirlaba meliputi tidak berorientasi pada keuntungan, tidak memiliki kepemilikan pribadi, memperoleh sumber daya melalui donasi tanpa kompensasi langsung, memiliki batasan penggunaan dana, dan tingkat tuntutan yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Karakteristik ini menunjukkan bahwa organisasi nirlaba memainkan peran penting dalam pelayanan publik dan membutuhkan manajemen keuangan yang efektif untuk menjaga kepercayaan publik.

Organisasi nirlaba dan organisasi profit berbeda secara mendasar dalam tujuan, sumber pendanaan, dan cara mereka menangani hasil kegiatan operasional. Organisasi yang berorientasi profit didirikan terutama untuk menghasilkan keuntungan, yang kemudian didistribusikan kepada pemilik atau pemegang saham, sedangkan organisasi nirlaba berfokus pada penyediaan layanan kepada masyarakat tanpa mendistribusikan keuntungan kepada pihak tertentu (Horngren dkk., 2018).

Menurut prinsip akuntansi, maksimalisasi laba dianggap sebagai indikator utama keberhasilan kinerja bagi organisasi yang berorientasi profit, sementara organisasi nirlaba mengukur keberhasilan berdasarkan seberapa baik tujuan sosial atau misi mereka tercapai. Dengan demikian, pengukuran kinerja di organisasi nirlaba cenderung lebih berfokus pada aspek non-keuangan dibandingkan dengan organisasi profit, yang umumnya bergantung pada indikator keuangan seperti laba bersih.

Selain itu, perbedaan juga dapat diamati dalam sumber pendanaan. Organisasi yang mencari keuntungan memperoleh pendapatan dari kegiatan operasional seperti

penjualan barang dan jasa, sementara organisasi nirlaba menerima pendanaan melalui donasi, hibah, dan kontribusi masyarakat yang tidak diharapkan memberikan pengembalian ekonomi langsung. Hal ini menyebabkan organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga kepercayaan publik dengan menyajikan laporan keuangan yang transparan (Needles & Powers, 2016).

Perbedaan lainnya terletak pada kepemilikan dan distribusi hasil bisnis. Dalam organisasi yang berorientasi laba, terdapat pemilik yang memiliki hak atas laba yang dihasilkan, sedangkan dalam organisasi nirlaba, tidak ada kepemilikan individu, sehingga semua sumber daya yang diperoleh digunakan kembali untuk mendukung kegiatan organisasi. Menurut Prinsip Akuntansi Keuangan, organisasi nirlaba tidak mendistribusikan laba, tetapi mengalokasikan surplus untuk memastikan keberlanjutan program dan layanan.

Dalam hal pelaporan keuangan, organisasi yang berorientasi laba menyiapkan laporan keuangan dengan fokus pada laporan laba rugi, sedangkan organisasi nirlaba menekankan laporan aktivitas yang menunjukkan perubahan aset bersih. Perbedaan ini mencerminkan tujuan utama masing-masing organisasi dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki (Warren dkk., 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara organisasi nirlaba dan organisasi yang berorientasi laba terletak pada tujuan, sumber pendanaan, kepemilikan, distribusi pendapatan, dan sistem pelaporan keuangan mereka. Perbedaan ini menunjukkan bahwa organisasi nirlaba memiliki karakteristik unik yang membutuhkan manajemen keuangan yang lebih berfokus pada akuntabilitas publik dibandingkan dengan organisasi yang berorientasi laba.

### **Akuntansi Organisasi Nirlaba**

Akuntansi organisasi nirlaba adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas yang tidak berorientasi pada keuntungan, dengan tujuan menyediakan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan. Tidak seperti akuntansi di organisasi yang berorientasi pada keuntungan, akuntansi nirlaba lebih menekankan pada pelaporan bagaimana dana dari donasi, hibah, dan sumber lain yang tidak mengharap kompensasi langsung digunakan (Halim & Kusufi, 2017).

Menurut Teori dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, akuntansi organisasi nirlaba berfungsi sebagai alat untuk akuntabilitas publik, yang menunjukkan bagaimana sumber daya yang diperoleh telah dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan organisasi. Hal ini menekankan bahwa akuntansi di organisasi nirlaba bukan hanya tentang pencatatan transaksi tetapi juga melibatkan aspek akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, Akuntansi untuk Entitas Pemerintah dan Nirlaba menjelaskan bahwa akuntansi organisasi nirlaba dirancang untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan, perubahan aset bersih, dan arus kas yang berguna bagi pihak internal dan eksternal dalam menilai kinerja dan keberlanjutan organisasi. Informasi ini sangat penting karena organisasi nirlaba bergantung pada kepercayaan publik untuk memperoleh sumber daya.

Selain itu, menurut Granof dan Khumawala (2016), akuntansi organisasi nirlaba memiliki karakteristik khusus terkait pelaporan aset bersih, yang dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan yang diberlakukan oleh donatur. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi organisasi nirlaba memiliki tingkat kompleksitas tersendiri dibandingkan dengan akuntansi di organisasi bisnis.

Kesimpulannya, akuntansi organisasi nirlaba adalah sistem yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan aktivitas keuangan suatu organisasi yang tidak bertujuan

mencari keuntungan, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan penyediaan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian tujuan sosial organisasi.

Akuntansi organisasi nirlaba bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan guna mendukung pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja organisasi. Informasi ini sangat penting karena organisasi nirlaba mengelola dana yang sebagian besar berasal dari publik, yang membutuhkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaannya (Granof & Khumawala, 2016).

Menurut Akuntansi Pemerintah dan Nirlaba, tujuan akuntansi untuk organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan aset bersih, dan arus kas organisasi, yang dapat digunakan oleh pihak internal dan eksternal untuk menilai kinerja dan keberlanjutan organisasi. Informasi ini juga membantu dalam mengevaluasi kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber dayanya secara efektif dan efisien.

Selain itu, akuntansi organisasi nirlaba bertujuan untuk menunjukkan akuntabilitas manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan oleh para donatur. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam Akuntansi untuk Entitas Pemerintah dan Nirlaba, yang menyatakan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba berfungsi sebagai alat akuntabilitas publik untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, menurut Needles dan Powers (2016), tujuan akuntansi organisasi nirlaba juga mencakup penyediaan informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi. Akses terhadap informasi keuangan yang baik memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai alokasi sumber daya dan meningkatkan efektivitas program yang diimplementasikan.

Kesimpulannya, tujuan akuntansi dalam organisasi nirlaba melampaui sekadar menyajikan laporan keuangan; hal ini juga mencakup penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan, peningkatan akuntabilitas, serta pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya.

Laporan keuangan merupakan aspek penting bagi organisasi nirlaba karena berfungsi sebagai alat utama untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan aktivitas organisasi kepada para pemangku kepentingannya. Dalam konteks organisasi nirlaba, laporan keuangan tidak hanya digunakan untuk keperluan internal tetapi juga berfungsi sebagai sarana akuntabilitas kepada pihak eksternal seperti donatur, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun secara transparan, akurat, dan dapat dipercaya (Warren dkk., 2017).

Menurut Akuntansi, laporan keuangan memainkan peran penting dalam memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, termasuk menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas. Dalam organisasi nirlaba, informasi ini sangat penting karena berkaitan dengan penggunaan dana yang berasal dari publik, sehingga harus jelas pertanggungjawabannya.

Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi. Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional menekankan bahwa laporan keuangan di entitas publik dan nirlaba harus mampu menunjukkan bagaimana sumber daya yang diperoleh telah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi.

Selain itu, laporan keuangan membantu manajemen dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi. Dengan memiliki informasi sistematis tentang pendapatan dan pengeluaran, manajemen dapat menilai efisiensi penggunaan dana dan membuat keputusan yang lebih akurat dalam menjalankan program organisasi (Harrison dkk., 2019).

Selain berfungsi sebagai alat untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas, laporan keuangan juga berperan dalam meningkatkan transparansi. Transparansi ini penting untuk keberlanjutan organisasi nirlaba, karena tingkat kepercayaan donor terhadap organisasi bergantung pada seberapa terbuka dan informatif organisasi tersebut tentang aktivitasnya. Tanpa laporan keuangan yang tepat, organisasi nirlaba akan kesulitan mempertahankan dukungan publik (Needles & Powers, 2016).

Kesimpulannya, laporan keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam organisasi nirlaba. Laporan tersebut berfungsi sebagai alat untuk akuntabilitas, dasar untuk pengambilan keputusan, sarana pengendalian, dan upaya untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap organisasi.

### **ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35)**

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) berfungsi sebagai panduan untuk penyajian laporan keuangan oleh entitas nirlaba. ISAK 35 diterbitkan oleh Asosiasi Akuntan Indonesia sebagai perbaikan dari standar sebelumnya, PSAK 45, dengan tujuan memberikan panduan yang lebih relevan dan selaras dengan perkembangan praktik akuntansi di Indonesia.

Menurut Asosiasi Akuntan Indonesia (2019), ISAK 35 menguraikan bagaimana entitas nirlaba harus menyajikan laporan keuangan mereka secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Standar ini tidak menentukan bagaimana cara mencatat dan mengukur pos-pos, tetapi lebih berfokus pada aspek pelaporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan dan aktivitas organisasi secara transparan dan akuntabel.

ISAK 35 memberikan pedoman tentang komponen pelaporan keuangan yang harus disertakan oleh organisasi nirlaba, yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan laporan kondisi keuangan. Selain itu, ISAK 35 memperkenalkan konsep pengklasifikasian aset bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan yang diberlakukan oleh penyedia sumber daya, sehingga memudahkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana organisasi menggunakan dana yang dikelolanya.

Selain itu, penerapan ISAK 35 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba agar menjadi lebih relevan, andal, dan mudah dibandingkan. Dengan adanya standar ini, diharapkan organisasi nirlaba dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana.

Dengan demikian, ISAK 35 dapat dipahami sebagai panduan penyajian laporan keuangan bagi organisasi nirlaba, yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) dikembangkan dengan tujuan memberikan panduan yang jelas tentang penyajian laporan keuangan untuk entitas nirlaba. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang diberikan oleh organisasi nirlaba, menjadikannya lebih relevan, andal, mudah dipahami, dan mudah dibandingkan bagi pengguna laporan keuangan. Dengan

diberlakukannya ISAK 35, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba akan secara akurat mencerminkan kondisi keuangan dan aktivitas mereka secara transparan, sehingga meningkatkan akuntabilitas kepada publik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

Selain itu, ISAK 35 bertujuan untuk memastikan konsistensi dalam penyajian laporan keuangan bagi organisasi nirlaba di Indonesia. Sebelum diberlakukannya standar ini, terdapat perbedaan praktik yang digunakan oleh berbagai organisasi nirlaba dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, ISAK 35 diberlakukan untuk memastikan penyajian laporan keuangan yang konsisten, sehingga memudahkan pengguna untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan antar organisasi yang berbeda (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

Cakupan ISAK 35 meliputi semua entitas nirlaba, seperti yayasan, lembaga sosial, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan nirlaba. Standar ini berlaku untuk entitas yang menerima sumber daya dari donor yang tidak mengharapkan pengembalian ekonomi langsung, sehingga mengharuskan mereka untuk menyajikan laporan keuangan sebagai sarana akuntabilitas atas penggunaan dana tersebut.

ISAK 35 secara khusus mengatur penyajian laporan keuangan, bukan pengakuan atau pengukuran transaksi. Oleh karena itu, entitas nirlaba masih merujuk pada standar akuntansi keuangan lainnya untuk pengakuan dan pengukuran, sementara ISAK 35 mengatur bagaimana informasi ini disajikan dalam laporan keuangan. Cakupan ini meliputi penyajian laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan, termasuk klasifikasi aset bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan yang diberlakukan oleh sumber pendanaan.

Dengan demikian, tujuan dan cakupan ISAK 35 menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan secara terstruktur dan terstandarisasi untuk organisasi nirlaba, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap organisasi tersebut.

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) merupakan peningkatan dari PSAK 45, yang sebelumnya digunakan sebagai pedoman penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia. Perubahan ini dilakukan oleh Institut Akuntan Indonesia untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar akuntansi yang lebih konvergen dengan standar internasional, serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan bagi entitas nirlaba.

Salah satu perbedaan utama antara ISAK 35 dan PSAK 45 terletak pada pendekatan penyajian laporan keuangan. PSAK 45 secara khusus menetapkan standar akuntansi untuk entitas nirlaba secara terpisah, sedangkan ISAK 35 tidak berfungsi sebagai standar yang berdiri sendiri tetapi berfungsi sebagai interpretasi yang melengkapi PSAK yang berlaku umum. Oleh karena itu, ISAK 35 lebih fleksibel karena entitas nirlaba masih merujuk pada PSAK umum untuk pengakuan dan pengukuran, sedangkan ISAK 35 hanya membahas aspek penyajian laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

Perbedaan lainnya terletak pada istilah dan struktur laporan keuangan. Menurut PSAK 45, laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan pembahasan serta analisis manajemen, menggunakan terminologi yang lebih spesifik yang berlaku untuk entitas nirlaba. Sementara itu, ISAK 35 mengadopsi istilah yang lebih umum yang selaras dengan PSAK lainnya, sehingga laporan keuangan lebih mudah dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Selain itu, mengenai klasifikasi aset bersih, PSAK 45 menggunakan istilah "aset bersih terikat" dan "aset bersih tidak terikat" dengan penjelasan yang lebih terbatas. Meskipun ISAK 35 lebih menekankan pada batasan dari penyedia sumber daya,

informasi yang disajikan menjadi lebih transparan dan informatif bagi pengguna laporan keuangan.

Dari perspektif implementasi, PSAK 45 telah dicabut dan digantikan oleh ISAK 35, yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas pelaporan keuangan organisasi nirlaba agar lebih selaras dengan praktik akuntansi yang diterima secara umum.

Kesimpulannya, perbedaan antara ISAK 35 dan PSAK 45 terletak pada pendekatan penyajian, penggunaan terminologi, dan penyesuaian yang dilakukan terhadap standar akuntansi yang lebih umum. ISAK 35 merupakan peningkatan yang memberikan panduan yang lebih relevan, fleksibel, dan sesuai untuk kebutuhan pelaporan keuangan organisasi nirlaba saat ini.

### **Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba**

Pelaporan keuangan dalam organisasi nirlaba melibatkan persiapan dan penyampaian informasi keuangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas organisasi kepada para pemangku kepentingan. Dalam organisasi nirlaba, laporan keuangan memainkan peran penting karena berfungsi sebagai alat akuntabilitas terkait penggunaan dana yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan dapat digunakan dengan tepat oleh pengguna laporan keuangan (Connolly & Hyndman, 2013).

Dalam menyajikan laporan keuangan, organisasi nirlaba harus mematuhi prinsip-prinsip dasar untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan berkualitas tinggi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan pemahaman bagi pengguna laporan keuangan. Prinsip relevansi berarti bahwa informasi yang diberikan harus dapat memengaruhi keputusan pengguna, sedangkan keandalan berkaitan dengan kejujuran dan keakuratan informasi yang diberikan. Selain itu, informasi yang disajikan harus dapat dibandingkan antar periode yang berbeda dan dengan entitas lain, serta disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pengguna (Connolly & Hyndman, 2013). Sejalan dengan hal ini, Federasi Akuntan Internasional menekankan bahwa penyajian laporan keuangan di sektor publik dan organisasi nirlaba harus mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya.

Tujuan pelaporan keuangan di organisasi nirlaba adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada para pemangku kepentingan untuk membantu pengambilan keputusan dan sebagai sarana akuntabilitas bagi manajemen terkait penggunaan dana yang telah dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan memberikan informasi tentang posisi keuangan, perubahan aset bersih, dan arus kas suatu organisasi selama periode tertentu. Informasi ini sangat penting bagi para donor, pemerintah, dan masyarakat dalam menilai kinerja dan keberlanjutan organisasi. Menurut Ebrahim (2003), laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk menilai seberapa efektif suatu organisasi mencapai tujuan sosialnya dan untuk memastikan bahwa dana yang diterima telah digunakan dengan cara yang efektif dan efisien.

Selain prinsip dan tujuan, laporan keuangan yang baik juga harus memiliki karakteristik kualitatif agar informasi yang diberikan dapat digunakan secara optimal. Menurut Dewan Standar Akuntansi Internasional, karakteristik utama laporan keuangan meliputi relevansi, representasi yang adil, keterbandingan, verifikasi, ketepatan waktu, dan kemudahan pemahaman. Dalam konteks organisasi nirlaba, karakteristik ini sangat penting karena laporan keuangan berfungsi sebagai sarana

untuk membangun kepercayaan publik. Studi yang dilakukan oleh Saxton dan Guo pada tahun 2011 menemukan bahwa tingkat transparansi dalam pelaporan keuangan memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan yang dimiliki para donatur terhadap organisasi nirlaba. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan oleh organisasi nirlaba harus mempertimbangkan prinsip, tujuan, dan karakteristik untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

### **Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35**

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam ISAK 35 (2019), laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari beberapa komponen utama yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi keuangan dan aktivitas organisasi. Komponen tersebut meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, ISAK 35 juga mengatur klasifikasi aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan dari pemberi dana.

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto organisasi pada suatu periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan organisasi secara keseluruhan. Contoh sederhana laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Aset</b>	
Kas	10.000.000
Peralatan	5.000.000
<b>Total Aset</b>	<b>15.000.000</b>
<b>Liabilitas</b>	
Utang	2.000.000
<b>Aset Neto</b>	
Tanpa Pembatasan	10.000.000
Dengan Pembatasan	3.000.000
<b>Total Aset Neto</b>	<b>13.000.000</b>
<b>Total Liabilitas + Aset Neto</b>	<b>15.000.000</b>

Laporan aktivitas merupakan laporan yang menunjukkan perubahan aset neto selama periode tertentu akibat aktivitas operasional organisasi. Laporan ini menggambarkan pendapatan dan beban yang terjadi. Contohnya adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Pendapatan</b>	
Donasi	8.000.000
<b>Total Pendapatan</b>	<b>8.000.000</b>
<b>Beban</b>	
Beban Operasional	3.000.000
<b>Total Beban</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Kenaikan Aset Neto</b>	<b>5.000.000</b>
Aset Neto Awal	8.000.000
<b>Aset Neto Akhir</b>	<b>13.000.000</b>

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini penting untuk menilai kemampuan organisasi dalam mengelola kas. Contohnya adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
Penerimaan Donasi	8.000.000

Pengeluaran Operasional	(3.000.000)
<b>Kas Bersih dari Operasi</b>	<b>5.000.000</b>
Kas Awal	5.000.000
<b>Kas Akhir</b>	<b>10.000.000</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang memberikan penjelasan rinci mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan serta informasi tambahan terkait angka-angka dalam laporan keuangan. Catatan ini membantu pengguna laporan dalam memahami isi laporan keuangan secara lebih mendalam.

<b>Catatan</b>	<b>Uraian</b>
1. Umum	Organisasi X merupakan entitas nirlaba yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, didirikan pada tahun 2020 dan berlokasi di Medan.
2. Dasar penyusunan	Laporan keuangan disusun berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi (ISAK) 35 menggunakan basis akrual dan konsep biaya historis.
3. Kebijakan Akuntansi	Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan dan disusutkan menggunakan metode garis lurus.
4. Kas dan Setara Kas	Saldo kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.000.000 digunakan untuk kegiatan operasional organisasi.
5. Aset Neto	Aset neto terdiri dari aset neto tanpa pembatasan dan dengan pembatasan sesuai dengan ketentuan dari pemberi dana.
6. Pendapatan	Pendapatan organisasi berasal dari donasi masyarakat yang tidak mengikat dan hibah dengan pembatasan tertentu.
7. Beban	Beban terdiri dari beban operasional seperti biaya administrasi, kegiatan sosial, dan biaya lainnya.

Selain itu, ISAK 35 juga mengatur tentang aset neto yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan. Aset neto tanpa pembatasan merupakan dana yang dapat digunakan secara bebas oleh organisasi, sedangkan aset neto dengan pembatasan adalah dana yang penggunaannya dibatasi oleh pemberi dana untuk tujuan tertentu.

Dengan demikian, komponen laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 memberikan gambaran yang lengkap mengenai kondisi keuangan, aktivitas, serta penggunaan dana dalam organisasi nirlaba, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

ISAK 35 menekankan bahwa aset neto dibagi berdasarkan pembatasan dari donor, jadi formatnya harus jelas seperti ini:

<b>Aset Neto</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Tanpa Pembatasan</b>	
Saldo Awal	8.000.000
Surplus Tahun Berjalan	5.000.000
<b>Saldo Akhir Tanpa Pembatasan</b>	<b>13.000.000</b>
<b>Dengan Pembatasan</b>	
Dana Program Pendidikan	3.000.000
<b>Total Aset Neto dengan Pembatasan</b>	<b>3.000.000</b>

**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sari dan Rahmawati (2020)	Analisis Penerapan ISAK 35 pada Organisasi Nirlaba	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi nirlaba belum sepenuhnya menerapkan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan, terutama pada penyajian laporan aktivitas dan klasifikasi aset neto.
2	Putri (2021)	Implementasi ISAK 35 dalam Laporan Keuangan Yayasan	Kualitatif	Penelitian menemukan bahwa penerapan ISAK 35 masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman sumber daya manusia dan keterbatasan sistem akuntansi.
3	Pratama dan Lestari (2022)	Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan sudah mengarah pada ISAK 35, namun masih terdapat ketiaksesuaian pada catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan aset neto.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya dengan memanfaatkan riset pustaka sebagai jenis penelitian yang dilakukan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan secara menyeluruh konsep penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba sesuai dengan ISAK 35, melalui analisis sumber tertulis yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal akademik, dan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Lembaga Akuntan Indonesia, khususnya ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan untuk entitas nirlaba. Selain itu, sumber data diperoleh dari artikel akademik yang diakses melalui Google Scholar serta referensi terkait lainnya mengenai akuntansi organisasi nirlaba.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumenter, yang melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan literatur yang relevan terkait dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan meliputi buku teks akuntansi, jurnal penelitian sebelumnya, dan standar akuntansi yang berlaku. Semua data yang dikumpulkan

kemudian dipilih dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara diuraikan, dibandingkan, dan diinterpretasikan informasi yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba sesuai dengan ISAK 35. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep, prinsip, dan komponen laporan keuangan organisasi nirlaba sesuai dengan standar yang berlaku.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai penerapan ISAK 35.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan tinjauan pustaka dari berbagai sumber seperti buku, jurnal akademik, dan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Lembaga Akuntan Indonesia, ditemukan bahwa penyajian laporan keuangan untuk organisasi nirlaba menurut ISAK 35 memiliki struktur dan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan entitas yang berorientasi laba. ISAK 35 menguraikan pedoman yang menekankan penyajian laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan mampu menggambarkan penggunaan sumber daya yang bersumber dari masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari empat komponen utama: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Keempat komponen tersebut bekerja sama untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan, perubahan aset bersih, dan arus kas suatu organisasi selama periode tertentu. Selain itu, ISAK 35 juga mengatur klasifikasi aset bersih menjadi dua kategori, yaitu aset bersih tidak terbatas dan aset bersih terbatas, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai penggunaan dana sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia dana.

Selanjutnya, temuan menunjukkan bahwa implementasi ISAK 35 memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba. Dengan implementasi standar ini, laporan keuangan menjadi lebih sistematis, lebih mudah dipahami, dan mampu dibandingkan antar periode serta antar organisasi. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi nirlaba.

Namun, berdasarkan literatur yang dianalisis, masih terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan ISAK 35, seperti pemahaman yang terbatas di kalangan sumber daya manusia, pelatihan yang tidak memadai dalam akuntansi nirlaba, dan sistem pencatatan keuangan yang belum berkembang di beberapa organisasi. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan laporan keuangan yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan persyaratan ISAK 35, khususnya dalam penyajian laporan aktivitas dan pengungkapan aset bersih.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ISAK 35 memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba. Implementasi standar ini tidak hanya membantu organisasi dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana organisasi nirlaba.

## **Pembahasan**

Berdasarkan temuan penelitian yang disajikan, pelaporan keuangan organisasi nirlaba sesuai dengan ISAK 35 menunjukkan peningkatan kualitas pelaporan keuangan, yang lebih terstruktur dan akuntabel. Standar ini menekankan pentingnya penyajian informasi yang relevan dan memastikan transparansi dalam penggunaan sumber daya kepada pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan pandangan Cordery dan Sinclair (2013), yang berpendapat bahwa akuntabilitas organisasi nirlaba sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada publik.

Penerapan ISAK 35, yang mengatur penyajian laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan pelaporan keuangan, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi organisasi. Menurut Hyndman dan McDonnell (2009), penyajian laporan keuangan yang komprehensif dapat membantu pengguna dalam memahami kinerja organisasi dan mengevaluasi efektivitas penggunaan dana. Memiliki struktur laporan keuangan yang jelas membuat informasi keuangan lebih mudah dipahami dan dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Selain itu, klasifikasi aset bersih menjadi aset bersih tidak terbatas dan aset bersih terbatas merupakan salah satu aspek penting dari ISAK 35. Ryan, Mack, dan Tooley (2014) menyatakan bahwa pengungkapan keterbatasan keuangan memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dengan para donatur, karena menunjukkan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menambah nilai bagi organisasi nirlaba dalam mempertahankan dukungan dari masyarakat.

Namun, implementasi ISAK 35 masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman standar akuntansi. O'Dwyer dan Unerman (2010) menjelaskan bahwa banyak organisasi nirlaba kesulitan dalam menerapkan standar pelaporan keuangan karena kurangnya pelatihan dan sumber daya yang memadai. Situasi saat ini mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, implementasi ISAK 35 berdampak positif pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi nirlaba.

Di sisi lain, implementasi ISAK 35 berdampak positif pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi nirlaba. Saxton, Neely, dan Dan Guo (2014) menunjukkan bahwa organisasi yang memberikan laporan keuangan secara transparan cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ISA 35 memainkan peran penting dalam menciptakan sistem pelaporan keuangan yang lebih baik, meskipun masih diperlukan peningkatan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia untuk memastikan implementasinya berjalan lancar dan efektif.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa organisasi akuntansi nirlaba memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada laba tetap memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada para pemangku kepentingan, seperti donatur, pemerintah, dan masyarakat. Penerapan standar akuntansi, khususnya ISAK 35 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, memberikan pedoman yang jelas dalam laporan keuangan organisasi nirlaba.

Standar ini mengatur komponen laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan, serta klasifikasi aset neto menjadi aset neto tanpa aset dan dengan aset neto. Dengan adanya pedoman tersebut, laporan keuangan menjadi lebih sistematis, relevan, dan mudah dipahami. Selain itu, penerapan ISAK 35 terbukti dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan pelatihan yang berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi organisasi nirlaba yang sesuai dengan standar yang berlaku merupakan faktor penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama proses persiapan penelitian. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para profesor pembimbing, Ibu Putri Kemala Dewi Lubis, SE, M.Si, Ak dan Ibu Dr. Khairani Alawiyah Matondang S.Pd., M.Si., Ak yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan selama proses penulisan artikel ini, yang memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan dengan sukses.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyediakan sumber dan referensi informatif yang sangat bermanfaat dalam proses penelitian, terutama instansi pemerintah dan berbagai lembaga yang menawarkan akses ke publikasi akademis dan laporan resmi terkait akuntansi organisasi nirlaba. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber sangat membantu dalam memperkaya analisis dan memperkuat landasan teoritis penelitian ini.

Selain itu, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua peneliti dan akademisi yang karya ilmiahnya menjadi referensi dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan telah memberikan kontribusi signifikan untuk memperluas pemahaman tentang audit kinerja dan hubungannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pemerintahan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anthony, R. N., & Young, D. W. (2019). *Management control in nonprofit organizations*. McGraw-Hill.
- Connolly, C., & Hyndman, N. (2013). *Charity accountability in the UK: Through the eyes of the donor*. *Qualitative Research in Accounting & Management*.
- Cordery, C. J., & Sinclair, R. (2013). *Measuring performance in the third sector*. *Public Management Review*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Ebrahim, A. (2003). *Accountability in practice: Mechanisms for NGOs*. World Development.
- Financial Accounting Standards Board. (2016). *Not-for-profit entities*.
- Granof, M. H., & Khumawala, S. B. (2016). *Government and not-for-profit accounting*. Wiley.
- Harrison, W. T., Horngren, C. T., Thomas, C. W., & Swardy, T. (2019). *Financial accounting*. Pearson.
- Hyndman, N., & McDonnell, P. (2009). *Governance and charities*. *Financial Accountability & Management*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *ISAK 35: Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi*

- nonlaba. IAI.
- International Accounting Standards Board. (2018). Conceptual framework for financial reporting.
- International Federation of Accountants. (2018). Public sector financial reporting framework.
- International Public Sector Accounting Standards Board. (2014). Conceptual framework for general purpose financial reporting.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate accounting*. Wiley.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Needles, B. E., & Powers, M. (2016). *Principles of financial accounting*. Cengage Learning.
- O'Dwyer, B., & Unerman, J. (2010). Enhancing the role of accountability in promoting NGO effectiveness. *Accounting, Organizations and Society*.
- Pratama, R., & Lestari, S. (2022). Evaluasi penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 pada organisasi nirlaba. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(3), 112–125.
- Putri, A. (2021). Implementasi ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan yayasan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 78–89.
- Ryan, C., Mack, J., & Tooley, S. (2014). Accountability in nonprofit organizations. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Salamon, L. M., & Anheier, H. K. (1997). *Defining the nonprofit sector*. Johns Hopkins University Press.
- Sari, D., & Rahmawati, E. (2020). Analisis penerapan ISAK 35 pada organisasi nirlaba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 45–56.
- Saxton, G. D., & Guo, C. (2011). Accountability online: Understanding the web-based accountability practices of nonprofit organizations. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*.
- Saxton, G. D., Neely, D. G., & Guo, C. (2014). Web disclosure and nonprofit accountability. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. (2017). *Accounting*. Cengage Learning.